

Analisis peluang badan usaha milik kampung (bumkam)

Anthonia Karolina Rejo Lobwaer¹, Muhammad Awal²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus Merauke

¹Email: lobwaer_feb@unmus.ac.id

²Email: awal_feb@unmus.ac.id

Abstrak

Guna mengetahui peluang pendirian Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) atau BUMDes di Kabupaten Merauke. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan informan dari badan pemberdayaan kampung, aparat distrik, aparat kampung, Perbankan, Swasta dan Perguruan tinggi. Teknik pengumpulan datanya Trianggulasi dan FGD (*focus group discussion*) dengan Proses pengolahan menggunakan teknik Analisis Peluang. Kondisi internal menunjukkan kekuatan terbesar terletak pada keuangan, kelemahan terbesarnya pada dokumen pendirian dan SDM namun yang paling berisiko adalah kinerja keuangannya, kondisi independensi BUMDes yang diterapkan pada wilayah lainnya ada kemungkinan sulit diterapkan, Penyertaan Modal masih bertumpu pada dana desa. Kabupaten Merauke berpeluang mendirikan badan Usaha Milik Kampung dengan membangun kemitraan dengan Badan Pemberdayaan Kampung, Aparat Distrik dan perguruan tinggi. Untuk pengembangan BUMKam maka kemitraan dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi, Perbankan, Swasta/BUMKam dan terkait pengembangan SDM kemitraan dengan semua mitra dapat dilakukan. Kemitraan yang paling mudah dilaksanakan yaitu dengan Perguruan tinggi melalui program Pengabdian kepada masyarakat dan program KKN. Jenis usaha yang paling mudah dijalankan adalah usaha dagang, penyewaan, usaha yang berisiko adalah pariwisata, simpan pinjam dan peternakan dan perikanan, walaupun demikian usaha tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

Kata Kunci: Bumkam; bumdes; peluang; kemitraan

Analysis of village-owned enterprises (bumkam)

Abstract

To find out the opportunity to establish a Village-Owned Enterprises (BUMKam) or BUMDes in Merauke Regency. This qualitative descriptive study uses informants from village empowerment agencies, district officials, village officials, Banking, Private and Higher Education. The data collection techniques are Triangulation and FGD (focus group discussion) with the processing using the Opportunity Analysis technique. Internal conditions show the greatest strength lies in finance, the biggest weakness in the establishment and HR documents, but the most risk is financial performance, BUMDes independence conditions applied in other areas may be difficult to apply, Capital Participation still relies on village funds. Merauke Regency has the opportunity to establish a Village Owned Enterprise by building partnerships with the Village Empowerment Agency, District Apparatus and universities. For the development of BUMKam, partnerships with the Government, Universities, Banking, Private and related to the development of HR partnerships with all partners can be done. The easiest partnership to do is with tertiary institutions through community service and community service programs. The easiest types of businesses are trading, leasing, and risky businesses such as tourism, savings and loans and animal husbandry and fisheries, however they have the potential to be developed.

Keywords: *Village-owned enterprise; opportunity; partnership*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau untuk wilayah otonomi papua bernama Badan Usaha Milik kampung sebagai implematasi kebijakan membangun dari pinggiran guna memperkuat desa/kampung yang didorong dengan sejumlah regulasi mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sejak dicanangkan dimana data menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2018 bertumbuh hingga 98 persen dan 61 persen desa di nusantara telah memiliki BUMDes dengan penyerapan tenaga kerja diatas satu juta orang dan omzet per tahun diatas 1 triliyun serta laba bersih seratus milyar pertahun Kementrian Desa, (2018). Pertumbuhan yang signifikan ini apakah mengisyaratkan kebangkitan perekonomian Indonesia yang bertumbuh dari pinggiran wilayah kesatuan. BUMDes secara ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional Ridlwan, (2014). Isu yang mengetarkan ini sayangnya belum menggelora secara merata, ketimpangan yang cukup signifikan antara wilayah barat dan wilayah timur pergerakannya seakan membentuk jarak yang begitu jauh tak terkejar. Ada apa dibalik lambatnya pertumbuhan BUMkam di wilayah timur terkhusus Merauke.

Seiring dengan pertumbuhan ini jumlah penelitian tentang isu inipun semakin banyak dan perlu diakui bahwa lebih banyak menyoroti BUMDes di wilayah lainnya di nusantara serta difokuskan pada analisis dan strategi pengembangannya, perbedaan mendasar penelitian ini dari penelitian lainnya adalah terletak pada wilayah sorotan yakni Merauke sebagai wilayah yang sangat lambat pertumbuhan BUMKamnya dimana sejak tahun 2014 hingga penelitian ini dilakukan dari 179 kampung baru 12 kampung yang memiliki BUMKam dan dari 12 kampung ini hanya 6 kampung yang tercatat memiliki kelengkapan organisasi sebagaimana regulasi yang berlaku sedangkan 6 kampung lainnya masih bersifat pelaporan pendirian tanpa disertai dokumen pendukung, pendiriannya pun baru pada tahun 2018 dan 2019 dan dengan menyoroti tentang peluang pendiriannya. Wilayah ini pun menjadi wilayah yang hangat diperbincangkan pada pertemuan-pertumbuhan nasional tentang pertumbuhan desa dan penyerapan dana desa hingga timbul perdebatan mengapa wilayah ini tidak dapat menyamai wilayah lainnya dalam bingkai NKRI. Meskipun harus diakui bahwa dengan luas wilayah dan kondisi geografisnya serta SDM yang memiliki keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat disamakan dengan wilayah lain yang semestinya dapat dimaklumi dan dorong lebih keras, namun penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi mengurai masalah BUMKam di kabupaten Merauke. Dengan demikian maka penelitian ini adalah kajian internal yang bertujuan untuk mengetahui peluang pendirian BUMKam di Kabupaten Merauke.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke selama 6 bulan, dengan Pendekatan deskriptif kualitatif Informan penelitian dipilih dari masyarakat kampung, Pemerintah (Aparat Kampung, Aparat Distrik dan Badan Pemberdayaan Kampung), Perbankan, Swasta dan Perguruan tinggi. Trianggulasi dan FGD (*focus group discussion*) adalah teknik pengumpulan data yang digunakan. Proses pengolahan data adalah mengumpulkan data, mendeskripsikan menyimpulkan dengan menggunakan teknik analisis data adalah Analisis Peluang dimana analisis ini merupakan Kajian mendalam terhadap lingkungan internal dan Kelompok Mitra untuk menciptakan peluang yang terdiri dari : 1. Tahap Identifikasi lingkungan internal yakni tahap dimana faktor-faktor kekuatan dan kelemahan ditentukan berdasarkan kajian terhadap regulasi, dana, Sarana Prasarana, Produk dan SDM pada kampung yang belum memiliki BUMKam 2.Tahap Kemitraan adalah tahap dimana menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan dengan cara mengambil keuntungan dari kemitraan. Pada tahap ini Kekuatan dan kelemahan dihubungkan dengan mitra yang dapat mengatasi kelemahan tersebut sehingga melalui kemitraan ini maka kelemahan tersebut bukan lagi menjadi kendala. 3.Tahap Peluang merupakan tahap mengidentifikasi jenis-jenis BUMKam berdasarkan Peluang yang telah tercipta melalui kemitraan dan menentukan Jenis BUMKam prioritas. 4. Tahap Memanfaatkan Peluang. Tahap akhir ini merupakan tahap dimana mengidentifikasi berbagai dokumen dan program yang harus dilakukan guna terwujudnya pendirian BUMKam, tahap ini dapat dikatakan juga sebagai tahap persiapan pendirian BUMKam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tahap I. Identifikasi lingkungan internal

Regulasi

Terkait dengan Badan Usaha Milik Kampung maka peraturan pusat menjadi faktor kekuatan dalam implementasi Pendirian dan Pengembangan BUMKam, Peraturan yang mendasari pembentukan BUMDes terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Jika diperlukan untuk mengatur lebih lanjut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang BUMDes. Demikian pula ditingkat desa, dapat dibuat peraturan desa tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing Ridlwan, (2015), meskipun untuk kabupaten merauke belum terdapat peraturan daerah tentang BUMKam namun hal ini bukan menjadi sebuah kelemahan karena tidak akan menjadi kendala dan dapat diakomodir oleh Peraturan Bupati Kabupaten Merauke nomor 9 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Kampung. Peraturan yang harus dimiliki adalah Peraturan Kampung, dilengkapi dengan AD dan ART, disinilah kelemahan terbesar sehingga berdampak pada belum terbentuknya BUMKam di sejumlah wilayah. Permasalahan kelemahan ini dikarenakan keterbatasan aparat kampung dan elemen kampung lainnya dalam merancang dan menetapkan serta kurangnya tenaga pendampingan yang hanya bertumpu pada aparat pemerintah dimana sesungguhnya sudah memiliki beban kerja lain yang cukup menyita waktu dan perhatian.

Dana

Penyertaan Modal Kampung yang bersumber dari alokasi anggaran dana kampung menjadi kekuatan terbesar dan walaupun ada penyertaan modal dari masyarakat maka akan dibatasi karena menurut pemahaman sebagian informan bahwa modal masyarakat yang lebih besar akan berdampak pada kendali Badan usaha dan tindakan dominisasi oknum tertentu. Meskipun secara regulasi BUMKam ini merupakan salah satu program prioritas dalam penyerapan dana desa namun tidak terlepas dari pengalokasian anggaran dana kampung yang ditetapkan, dimana rata-rata pemahaman masyarakat bahwa pembangunan kampung adalah pembangunan fisik, dan tingkat kepercayaan akan transparansi penggunaan dana pelaporan yang tidak jelas mempengaruhi sudut pandang bahwa BUMKam ini tidak akan berjalan, hal ini menjadi kendala dalam persetujuan masyarakat akan pengalokasian dana penyertaan modal. Namun diantara berbagai sikap pesimis kelompok-kelompok tertentu, Optimisme aparat kampung dalam mewujudkan pendirian BUMKam Kampung Sarmayam Indah dinyatakan dengan adanya alokasi anggaran dana BUMKam pada Dana Desa 2019. terdapat perbedaan dengan kondisi Sumbawa barat sebagaimana dikemukakan Ibrahim et al. (2019) bahwa faktor anggaran adalah faktor penghambat dalam pengembangan BUMDes di wilayah tersebut. Permasalahan Dana untuk BUMDes sebagaimana dikemukakan oleh aparat badan pemberdayaan Kampung kabupaten Merauke bukan suatu hambatan bagi kampung karena sesungguhnya memiliki kecukupan dana karena selain dialokasikan dari dana kampung dalam bentuk dana tunai dapat berupa pengelolaam asset kampung selain itu pula maka bantuan modal kabupaten, propinsi dan kementerian juga dapat diperoleh melalui mekanisme pengajuannya. Untuk Kabupaten merauke ditahun 2019 beberapa BUMKam memperoleh Bantuan Modal kementerian, walaupun sampai saat ini belum ada bantuan modal dari kabupaten dan proponsi namun tidak menutup kemungkinan pada waktu-waktu mendatang, selanjutnya ditegaskan pula bahwa dana bukanlah hambatan melainkan pendampingan pendirian, pengelolaan dan tata cara pengelolaannya yang harus menjadi fokus perhatian bersama berbagai elemen, sebagaimana dikemukakan bahwa tata kelola yang menjadi kekuatan pemerintah maka kemiripan kondisi yang dihadapi oleh kabupaten temanggung dimana bahwa terdapat BUMdes yang tidak mempunyai laporan keuangan Purbawati *et al.*, (2019). Dan terkait dengan pelaporan keuangan dan kinerja ini untuk wilayah merauke menurut pendapat beberapa aparat distrik bahwa mereka agak pesimis karena untuk kondisi Kampung yang telah memiliki BUMKam tidak ada pelaporan yang ditujukan kepada distrik bahkan ketika kami mengajukan pertanyaan yang sama kepada Aparat Badan Pemberdayaan Kampung bahwa rata-rata semua BUMKam yang telah berdiri tidak memberikan laporan secara berkala dan hal ini dipengaruhi pula dari independensi BUMKam itu sendiri dimana untuk kondisi di temanggung independensi diperlukan untuk pengembangan BUMDes di wilayah tersebut, untuk kondisi kabupaten merauke ini sebagian informan berpendapat bahwa

sebaiknya ditinjau lagi dan hal ini merupakan dilemema khusus bagi pemerintah dalam pengontrolan penyertaan modal dan tingkat pengembaliannya

Sarana prasarana

Persyaratan Utama Pendirian BUMKam disuatu wilayah selain penyertaan modal dari pemerintah kampung, Sumber daya Manusia, Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Alam serta perlu adanya inisiatif dari masyarakat kampung atau pemerintah kampung. Sehingga pada point sarana prasaran ini kami menyoroti tentang Potensi Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Inisitif masyarakat.

Pemahaman masyarakat dan aparat kampung sangat mempengaruhi inisiatif untuk mendirikan BUMKam, rata-rata informan yang mewakili masyarakat dan aparat kampung memiliki pemahaman dan pengetahuan yang rendah terhadap BUMKam dimana hanya 20% yang sudah pernah mendengar tentang BUMKam meskipun belum memahami dan hal ini dikarenakan tugas mereka sebagai aparat kampung dimana BUMKam merupakan bagian dari program prioritas penggunaan dana desa, 80% lainnya bahkan belum pernah mendengar apa itu BUMKam, setelah diberi pengenalan ringkas tentang BUMKam, sebagian informan berpendapat bahwa BUMKam akan memukul usaha-usaha individu yang sudah berjalan dikampung, sebagian pula berpendapat akan menguntungkan pihak-pihak tertentu dan ada pula yang berpendapat bahwa hanya akan berakhir dengan pengeluaran yang tidak akan menghasilkan sebagaimana program-program sejenis yang tidak berhasil di masa lampau, sehingga inisiatif pendirian BUMKam ini masih didominasi oleh pendapat aparat kampung.

Aset-aset yang berpotensi untuk pengembangan ekonomi desa apabila dikelola secara maksimal adalah Tanah Kampung, Bengkel Kampung, Peralatan Pertanian. Terkait dengan Bengkel Kampung dan Peralatan Pertanian meskipun telah berjalan namun memiliki struktur organisasi yang lemah serta tata kolola yang buruk sehingga terjadi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tidak adanya tindakan pemeliharaan prefentif.

Rata-rata kampung dikabupaten merauke berpotensi sebagai padang penggembalaan alami dan pembudidayaan ikan air tawar serta hamparan padang, laut dan hutan sebagai wisata alam yang layak dikembangkan, hasil produk-produk pertanian baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Potensi-potensi ini berpeluang menciptakan ruang bagi usaha-usaha peningkatan ekonomi masyarakat.

Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang disoroti adalah SDM penghasil produk pertanian dan SDM Pengelola BUMKam. Hampir keseluruhan masyarakat adalah penghasil produk pertanian dan Antusias masyarakat dalam pengelolaan produk-produk pertanian cukup tinggi hal ini terlihat dari perkembangan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sebagai organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan, dimana sering diadakan pelatihan-pelatihan pengelolaan produk pertanian dan ketrampilan lainnya melalui kerjasama dengan instansi-intstansi pemerintah terkait, organisasi-organisasi wanita, serta perguruan tinggi baik dalam program-program KKN maupun. program pengabdian kepada masyarakat, hingga saat ini selain produk-produk pertanian maka produk-produk olahan hasil perrtanian cukup melimpah dikampung-kampung, Kendala utama terletak pada SDM Pengelola BUMKam, dimana rata-rata SDM yang tersedia memiliki tingkat pengetahuan yang kurang terhadap pengelolaan organisasi berbasis keuntungan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Sofyani et al., (2019) bahwa faktor individu mempengaruhi kinerja BUMDes, diperlukannya ketrampilan dan pelatihan, serta keinginan untuk berpartisipasi dalam pengembangan desa dan tidak semata-mata pada penghasilan atau gaji yang diterima. Rata-rata SDM dengan tingkat pengetahuan lebih, memilih berkarier di luar kampung serta berusaha untuk keuntungan individu, selain kondisi pengetahuan, sudut pandang masyarakat dan konflik kepentingan turut mempengaruhi SDM yang akan berperan dalam pengelolaan BUMKam. Kendala SDM ini juga berasal dari pemahaman masyarakat dan kepercayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang telah terjadi sebelumnya, sehingga keengganan untuk memulai dan terlibat serta keengganan untuk percaya kepada yang lainnya, dan permasalahan ini tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang sudah dihadapi oleh BUMDes yang telah berjalan sebagaimana dikemukakan Anggraeni, (2017) tentang transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat cenderung melihat dan mencontohkan yang sudah ada, dengan berpatokan pada keberhasilan dan Kegagalan BUMKam yang telah berdiri semakin banyak BUMKam yang berhasil maka semakin baik sudut pandang mereka

terhadap BUMKam sebaliknya semakin banyak BUMKam yang gagal semakin mengikis habis kepercayaan masyarakat bahwa BUMKam mampu berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian kampung. Rata-rata insentif pendirian BUMKam berasal dari aparat kampung dan hal ini dipengaruhi oleh keinginan untuk mengikuti isu pendirian BUMKam agar sama dengan kampung atau desa lainnya tanpa memiliki pemahaman dan tekad yang kuat untuk tujuan peningkatan ekonomi, hanya karena ingin tampak sama dengan yang lainnya, sedangkan bagi masyarakat bahwa BUMKam adalah lahan untuk kepentingan dan keuntungan sebagian pihak yang akan berakhir dengan pertanggungjawaban yang buruk dan penyalahgunaan dana desa. Untuk Kondisi ini maka optimisme kampung baik aparat dan masyarakat dan peran berbagai pihak dapat menjadi solusi guna pengembangannya, tidak dipungkiri bahwa BUMKam adalah pola pemberdayaan masyarakat yang diharapkan bukan hanya memerlukan SDM berkualitas tetap sebagai tempat pembinaan dan pelatihan guna menghasilkan SDM yang berkualitas, dengan demikian maka meskipun SDM merupakan faktor kelemahan disetiap kampung namun diharapkan tidak menjadi kendala dalam pendirian dan pengembangan BUMKam di wilayah timur sebagaimana dikemukakan oleh aparat distrik dan badan pemberdayaan kampung.

Pemasaran

Kondisi pemasaran yang utama adalah Pasar yang terbentuk dari kebutuhan untuk menjual dan kebutuhan untuk membeli. Sebagaimana situasi yang terjadi, adanya kebutuhan masyarakat untuk menjual berbagai hasil pertanian dan produk olahan pertanian sehingga hal ini membutuhkan pasar yang lebih luas atau kebutuhan akan pasar di luar kampung sarmayam, sebaliknya kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air minum, BBM untuk kebutuhan RT dan pertanian yang dikarenakan akses untuk mendapatkan BBM yang sulit dan antrian untuk pelayanan alat-alat pertanian (ALL Sinta), menjadi peluang untuk menciptakan pasar di dalam kampung.

Analisis tahap II. Kemitraan

Undang-undang tentang desa sebagai payung hukum otonomi desa, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan gerakan-gerakan memaksimalkan potensi-potensi yang ada didaerah terutama dikampung-kampung. Sebagai elemen penting pemerintah kampung dalam kewenangan yang dimilikinya mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pembangunan kampung yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan salah satu hal yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah distrik, Badan Pemberdayaan kampung merupakan jalur birokrasi dan kewajiban berjenjang terkait pendirian dan pengembangan BUMKam, pemerintah daerah lainnya terutama pada instansi-instansi yang memiliki program-program pengembangan kampung, hal ini menjadikan instansi-instansi pemerintahan ini menjadi mitra utama Pemerintah kampung selain instansi-instansi pemerintah maka Pendamping Kampung yang berkedudukan di distrik dan kabupaten merupakan bagian dari pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kemampuan berkontribusi dalam pengembangan potensi ekonomi dan sumberdaya alam, pendampingan seta monitoring dan Kontrol terhadap BUMKam, namun, peran ini belum disadari sungguh oleh Pemerintah kampung serta kampung belum menangkap peluang ini dengan baik, sehingga lembaga-lembaga tersebut masih dipandang dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan serimonial saja, untuk beberapa kampung telah memiliki BUMKam bahkan ada diantaranya dengan penyertaan dana kampung dengan nilai yang cukup fantastis, namun kondisi ini tidak mengahantar BUMKam tersebut untuk menjadi BUMKam yang mampu berkontribusi lebih pada peningkatan ekonomi bahkan rata-rata BUMKam yang didirikan tersebut tidak mampu berjalan sebagaimana yang diharapkan bahkan ada yang sudah tidak beroperasi lagi. Kondisi ini selain dari konflik-konflik internal dan pengelolaan yang buruk maka lemahnya Kontrol dan monitoring menjadi pemicu lainnya, tidak adanya regulasi khusus terkait kontrol dan monitoring ini mengakibatkan distrik memiliki keterbatasan untuk mengontrol dan memberikan saran pengembangan. Berdasarkan struktur organisasi BUMKam dan rancangan Perkam BUMKam maka akan sangat sulit untuk pihak distrik melakukan monitoring dan kontrol langsung, hal ini sangat kontras dengan upaya penyerapan dana yang baik, pendamping desa, pemerintah distrik adalah pihak yang paling memahami tentang penyerapan dana dan pelaporan yang baik selain itu maka kedekatan jarak dan birokrasi berjenjang menyiratkan bahwa membangun kemitraan dengan distrik dan

pendamping guna pengembangan BUMKam akan sangat bermanfaat. Kepala Kampung sebagai Penasihat BUMKam menjadikan kontrol Kampung terhadap Perkembangan BUMKam dapat dampak, Pemerintah kampung haruslah berinisiatif dalam melibatkan pemerintah distrik dan pendamping baik dalam bentuk pelaporan dan atau meminta masukan terkait perkembangan BUMKam dari laporan yang dihasilkan, dengan inisiatif pemerintah kampung dengan cara demikian maka secara tidak langsung menciptakan kemitraan dengan pemerintah lainnya. Pada dasarnya kemitraan dengan pemerintah lainnya memberi peluang bagi kampung dalam pengembangan Potensi ekonomi dan SDA dan terkhusus untuk Pemerintah Distrik dan Badan Pemberdayaan Kampung memberi peluang bukan pada pengembangan potensi tersebut saja melainkan pada pendirian dan pengawasan

Selain Kemitraan Pemerintah Desa, Badan Pemberdayaan Kampung Pendamping Kampung yang berkedudukan di distrik, Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, Maka Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan). Sehingga Pendamping pihak ketiga ini kami soroti sebagai kemitraan yang dapat dibangun kampung selain dari sisi pemerintahan. Dari Sisi modal maka kemitraan dengan Pihak Perbankan, BUMKam Lainnya dan pihak swasta dapat dilakukan, jika dari pihak perbankan maka dalam bentuk kredit usaha dan penyertaan modal dapat berasal dari swasta atau BUMKam Lainnya selain ini maka program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dapat menjadi pintu masuk kemitraan, dan tentulah hal ini hanya dapat terlaksana seetalah melewati prosedur-prosedur yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut. Untuk Swasta maka kemitraan dapat pula terjalin guna pengembangan SDM. Perguruan tinggi dapat menjadi mitra yang baik terkait pendampingan pendirian dan Pengawasan BUMKam, Pengembangan Potensi Ekonomi, dan Pengembangan Potensi SDM.

Pendapat rata-rata pihak swasta hanya dapat berkontribusi melalui program *CSR* dan tentunya melalui pengajuan proposal dan penilaian kelayakan untuk dibiaya, ada sebagian yang dapat berkontribusi untuk mengatasi persoalan belum adanya Perkan, AD dan ART namun harus memiliki imbal jasa, Apabila terbinanya kerjasama dari sisi penyertaan modal maka tentu pula melalui kajian investasi yang menguntungkan pada umumnya juga berpendapat bahwa tidak akan berdampak banyak bagi mereka mengingat BUMKam untuk kesejahteraan desa sama halnya yang dikatakan kepemilikan dan komposisi saham perusahaan milik desa tidak signifikan terhadap omset entitas bisnis Lubis and Muda, (2018). Bagi pihak perbankan maka kemitraan dapat dilakukan melalui pengajuan dan pemberian kredit dan juga dengan program *CSR* dan melalui sejumlah prosedur. Untuk program *CSR* ini sendiri untuk sebagian perusahaan dapat berupa keuangan dan berupa pelatihan dan pengembangan SDM, Meskipun kemitraan dari sisi BUMKam bersama menjadi sebuah wacana yang diharapkan dapat diimplementasikan namun terdapat sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan sebagaimana halnya dikemukakan oleh Tarlani & Suhirman, (2019) Menurut pendapat beberapa informan Kemitraan dapat dilakukan dengan BUMKam lainnya adalah dengan studi banding ke BUMKam yang telah berhasil dan hal ini juga dipandang jauh lebih efektif. Pendapat sebagian besar aparat kampung serta pemerintah distrik dan Badan Pemberdayaan bahwa Perguruan tinggi dapat berkontribusi lebih dari sisi pendampingan pendirian baik identifikasi potensi SDA dan ekonomi, Pendampingan dalam pengembangan SDA dan Pendampingan Pengembangan SDM serta pendampingan tata kelolanya, Meskipun mereka berpendapat bahwa Perguruan tinggi dapat juga ikut serta dari sisi pengawasannya namun hal ini sangat sulit untuk dijalankan mengingat tidak ada regulasi tentang hal ini, terkecuali apabila Perkam, AD dan ART mengatur tentang hal tersebut bahkan untuk pengawasan dan control ini Badan pemberdayaan kampung dan Pemerintah distrikpun memiliki keterbatasan.

Analisis tahap III. Peluang

Analisis tahap ini dilakukan dalam bentuk FGD (*focus group discussion*). Dimana diskusi diawali dengan pemaparan hasil penelitian pada Tahap I dan II dan mengiringi peserta untuk membahas terlebih dahulu pemaparan tersebut kemudian mengemukakan pendapat terkait jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan. Jenis usaha dagang berpotensi didirikan guna mengakomodir kebutuhan distribusi hasil pertanian dan produk-produk pengolahan ke pasar yang lebih luas atau pasar diluar sekaligus sebagai perantara untuk penyediaan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus didatangkan dari kota atau kampung lainnya. Usaha depot air dikembangkan berdasarkan pandangan tingginya permintaan air galon untuk beberapa kampung. Untuk jenis usaha penyewaan pada dasarnya untuk

memenuhi kebutuhan pengelolaan alat-alat pertanian (alsinta yang lebih maksimal, hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang buruk sehingga tidak menguntungkan sedangkan masyarakat harus melakukan penyewaan dengan pihak swasta yang berdampak pada rendahnya keuntungan yang diperoleh masyarakat dimana dalam penelitian kami tentang Strategi Rantai Pasokan Usaha Penggilingan Padi Kabupaten, kemandirian petani dan kemitraan yang saling menguntungkan diharapkan dapat memberikan keuntungan seimbang dan wajar pada tiap jaringan rantai pasokan Lobwaer, (2018) demikian pula dengan usaha bengkal, namun kedua usaha ini diharapkan kedepannya mampu mengakomodir kebutuhan-ketuhan terkait lainnya dan tidak terbatas pada alat-alat pertanian. Usaha Wisata, Peternakan dan Tambak Ikan merupakan jenis usaha yang dipertimbangkan berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, meskipun ketiga usaha ini ada dalam perdebatan yang cukup sengit karena perbedaan pendapat bahwa usaha ini sulit dijalankan karena membutuhkan dana yang besar dan resiko pengembalian yang lambat dan konflik-konflik internal, ketiga usaha ini masih dipandang sebagai usaha yang tidak terlalu menjanjikan, namun pada akhirnya usaha ini dapat diterima dan diharapkan dapat dikembangkan pada suatu masa di waktu mendatang. Pengusulan Usaha Transportasi diharapkan menjadi usaha pelengkap guna memperlancar arus transportasi sehingga menjadi pelengkap dan pendukung usaha-usaha lainnya. Usaha Simpan Pinjam meskipun diragukan sebagai usaha dengan tingkat resiko yang lebih tinggi namun tetap dipandang sebagai usaha yang dapat dijalankan. Terkait dengan sektor peternakan maka kabupaten merauke memiliki potensi yang sangat besar dengan tingkat pemotongan harian cukup tinggi maka kebutuhan ternak sapi cukup tinggi namun berdasarkan rantai pasokan saat ini meskipun panjangnya rantai pasokan tidak mempengaruhi harga daging sapi namun mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh pada masing-masing rantai pasokan, Jika Petani yang berperan sebagai produsen maka akan memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi, sayangnya untuk kondisi saat ini petani lebih banyak berperan sebagai pemasok. (A. K.R. Lobwaer et al. 2019). Apabila sektor peternakan sapi ini dikembangkan dan ditunjang oleh usaha transportasi maka BUMKam dapat berperan sebagai produsen sehingga meningkatkan keuntungan yang dimiliki peternak.

Analisis tahap III. Peluang

Berdasarkan Analisis pada 3 tahap sebelumnya dan telaah dokumen terkait maka sudah dapat dikatakan bahwa Pembuat perkam, AD, ART, mengalokasi dana desa sebagai penyertaan modal dan membuat program-program pengembangan sumber daya manusia adalah bentuk dari pemanfaatan peluang yang telah diciptakan. Pendampingan Untuk Tahap pendirian maka Sebagian besar BUMKam dikabupaten merauke dilakukan oleh Badan Pemberdayaan kampung, satu kampung didampingi oleh perguruan tinggi, dan ada kampung yang didampingi pihak lainnya namun dengan biaya yang cukup besar. Untuk tahap ini Badan pemberdayaan kampung mengemukakan bahwa kesulitan waktu dan beban kerja yang dimiliki mereka membuat mereka kesulitan untuk menjangkau lebih banyak kampung sedangkan kebutuhan dan permintaan pendampingan cukup banyak, jika perguruan tinggi dapat berkontribusi dari sisi ini maka mereka siap bekerjasama dan mengharapkan pihak perguruan tinggi dapat berkordinasi dengan mereka maupun aparat disrtik sehingga mampu menyamakan pendapat. Peluang Pendirian terbesar adalah dari pengalokasian anggaran hal ini sejalan dengan kondisi internal bahwa dana adalah kekuatan yang dimiliki oleh semua kampung yang berada di kabupaten merauke. Terkait dengan Permasalahan SDM maka kampung dapat menyertakan masyarakat dalam program pengembangan SDM yang dilakukan oleh pihak swasta serta dan program pengabdian kepada masyarakat dan program KKN yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kebanyakan informan berpendapat bahwa peluang pendirian ini dapat diraih persoalannya terletak pada pengembangannya dan hal ini sejalan dengan berbagai catatan penelitian bahwa

SIMPULAN

Merauke berpeluang untuk pendirian dan pengembangan BUMKam setara dengan wilayah lainnya di Indonesia dengan bertumpu pada kekuatan dana yang dimiliki. Kelemahan terbesarnya terletak pada dokumen pendirian dan SDM, namun dengan kerjasama Badan Pemberdayaan Kampung, Pemerintah Distrik, Aparat Kampung dan Perguruan tinggi maka akan menjadi solusi optimal tentunya hal ini bukan berarti mitra lainnya tidak penting. Kondisi paling mengkuatirkan adalah

Pengembangannya atau kinerja keuangannya. Sanksi setelah kerugian atau penyelewengan bukan solusi yang tepat sehingga perlu dikaji mekanisme pelaporan keuangannya dimana BUMKam untuk wilayah Merauke tidak dapat menganut sistem independensi sebagaimana wilayah lainnya tetapi memerlukan fungsi kontrol yang melekat, berjenjang serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2017. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta."
- Ibrahim, Ibrahim, Iwan Tanjung Sutarna, Ibrahim Abdullah, and Kamaluddin Kamaluddin. 2019. "Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat." *Sosiohumaniora* 21(3): 349–54.
- Kementrian Desa. 2018. "Perkembangan Jumlah BUMDes 2014-2018." <http://kemendes.go.id/berita/assets/images/banner/5fd5a2db-1695-4ab4-8238-4e26e0215e0b.jpg>.
- Lobwaer, A. K.R., M. Awal, I. W. Muafa, and T. G. Rasyid. 2019. "Supply Chain in the Scapegoat of Price Fluctuation Beef." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 343(1).
- Lobwaer, Anthonia Karolina Rejo. 2018. "STRATEGI RANTAI PASOKAN USAHA PENGGILINGAN PADI KABUPATEN MERAUKE." *JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL* 9(2): 74–79.
- Lubis, Arifin, and Iskandar Muda. 2018. "Analysis of Ownership and Stock Composition of Vocational Business Enterprises (BUMDES) and Its Impact on" Omset" of Business Owned Enterprises." In *1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017)*, Atlantis Press.
- Purbawati, Dinalestari et al. 2019. "BUMDES Financial Good Corporate Governance (Case Study at BUMDES in Tembarak District, Temanggung Regency)." In *3rd International Conference on Indonesian Social & Political Enquiries (ICISPE 2018)*, Atlantis Press.
- Ridlwan, Zulkarnain. 2014. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa." *Jurnal Ilmu Hukum* 8(3): 424–40.
- . 2015. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes." *Fiat Justisia* 7(3).
- Sofyani, Hafiez, Randi Atmaja, and Sri Budhi Rezki. 2019. "Success Factors of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Performance in Indonesia: An Exploratory Study." *Journal of Accounting and Investment* 20(2): 44–58.
- Tarlani, Mr, and Mr Suhirman. 2019. "Behind the Joint BUMDes (Badan Usaha Milik Desa Bersama)(Insight the Motive for Establishing Joint BUMDes Danar Garut)." In *International Conference on Rural Studies in Asia (ICoRSIA 2018)*, Atlantis Press.